eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 2, 2019 : 9007-9019
ISSN 2541-674x, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PEMBELIANGAN KECAMATAN SEBUKU KABUPATEN NUNUKAN

Endah Mulyana[1], Aji Ratna Kusuma[2], Dini Zulfiani[3] [1]

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini termasuk Deskritif Kualitatif, fokus penelitian meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan di bidang Infrastruktur yaitu partisipasi dalam perencanaan jalan, partisipasi dalam perencanaan puskesmas dan partisipasi dalam perencanaan pasar. Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara Library Research (penelitian kepustakaan) dan Field Work Research (penelitian lapangan). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari key informan dan informan yang telah peneliti tentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing/verifying).

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pembeliangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dikatakan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: Pertama, mekanisme perencanaan pembangunan yang kurang tepat, dimana pemerintah desa tidak melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam musrenbang seperti pengelompokkan masalah, hasil penentuan peringkat masalah, usulan tindakan yang layak (peramalan) dan penentuan peringkat tindakan (rekomendasi) yang melibatkan masyarakat. Kedua, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh aparat desa terkhusus dalam perencanaan pembangunan jalan, sedangkan pembangunan gedung puskesmas dan pasar tidak dilakukan musrenbang bersama masyarakat sehingga fasilitas yang sudah dibangun tidak terpakai dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah desa merupakan pembangunan yang

[1] Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
[2] Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
[3] Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Email:

berasal dari atas ke bawah, mulai dari proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses-proses pengontrolan diformat dari atas ke bawah. Terakhir, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk di Desa Pembeliangan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, yakni mayoritas lulusan SD dengan presentase 26,17%.

Kata Kunci : Partisipasi,Perencanaan Infrastuktur.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih diperhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana. Desa Pembeliangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sebuku dan merupakan bagian wilayah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan observasi sementara peneliti, Desa Pembeliangan masih dikatakan daerah tertinggal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum lengkap atau memadai seperti sarana peribadatan yaitu pembangunan masjid yang belum sepenuhnya rampung, sarana olahraga yang minim, sarana kesehatan seperti fasilitas yang tidak memadai dan jalan aspal yang rusak bahkan sarana dan prasarana di kantor desa itu sendiri yang belum dapat dikategorikan memadai. Prasarana jalan selalu diprioritaskan karena memungkinkan terjadinya mobilitas perseorangan dan perbaikan mutu kehidupan masyarakat. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, dan salah satu diantaranya adalah perencanaan. Secara ideal pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Namun keinginan ini seringkali tidak tercapai karena berbagai hal dan keterbatasannya.

Agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, pelestarian dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, agar lebih mudah perbaikan jalan maupun sarana lainnya harus disertai partisipasi masyarakat dalam proyek perencanaan prasarana agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya. Dalam hal ini pastilah ada keterkaitan antara pemerintah

desa dengan masyarakat yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga sangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam mempercepat kemajuan desa.

Dalam pengamatan peneliti, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau dalam proses musyawarah pengambilan keputusan sangat rendah dikarenakan kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa dan tidak adanya undangan perencanaan pembangunan. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah berkebun dan nelayan. Masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan daripada kegiatan pertemuan yang dianggap dapat mengurangi penghasilan. Contoh kegiatan perencanaan yang di dalamnya kurang partisipasi masyarakat adalah kegiatan yang bersifat kemasyarakatan seperti penghijauan, penyuluhan, bahkan dalam rapat untuk pembangunan. Hal ini sangat mempengaruhi proses pembangunan ke depannya, misalnya pada saat musyawarah perencanaan pembangunan banyak masyarakat yang tidak hadir dengan bermacam-macam alasan. Namun, ketika keputusan sudah diambil dan dalam proses pelaksanaan pembangunan, banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak setuju bahkan protes. Akibatnya pembangunan yang sudah direncanakan jadi terkendala dan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bahkan bangunan yang telah dibangun tidak dipergunakan. Contohnya pasar, gedung PKK, puskesmas, dan gedung TK. Berdasarkan observasi sementara di lapangan dan permasalahan yang telah uraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan insfrastruktur di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan insfrastruktur di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan insfrastruktur di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Partisipasi

Menurut Soemarto dalam Sembodo (dalam Solekhan, 2014:141), partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovasi lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana

ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Untuk memperjelas pengertian tersebut, Isbandi (2007: 27), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan, maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat.

Kemudian Heller (dalam Hetifah Sj Soemarto (2003) berpendapat baha partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan bangsa.

Selanjutnya menurut Slamet sebagaimana yang dikutip Suryono (2001:124), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian Pembangunan

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Itulah pembangunan, bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusumah, 2005).

Pembangunan di wilayah pedesaan tentunya tidak akan terlepas dari pelibatan masyarakat dan *stakeholders* yang terlibat. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan di pedesaan dapat menjadi faktor keberhasilan program tersebut.

Pengertian Perencanaan

Menurut Conyerst dan Hills (dalam Tarigan, 2008: 5) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencpai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Tjokroamidjoyo (dalam Solekhan, 2014: 58) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses persiapan sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Setyaningrum (1997) infrastruktur adalah bagian dari capital stock suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang mendukung produksi. infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996:92) menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu diantara upaya untuk memecahkan sumbatan– sumbatan pada perekonomian.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah penjelasan dan peristiwa atau tingkah laku yang diamati, baik yang telah diungkapkan guna dapat menciptakan ide-ide abstrak yang umum sebagai landasan operasional.

Berkenaan dengan penelitian penulis mencoba merumuskan definisi konsepsional yang merupakan pembatasan terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur adalah proses keterlibatan masyarakat berupa ide atau pemikiran untuk memecahkan persoalan dan juga merupakan proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

penulis mengemukakan penelitian ini ke dalam kelompok penelitian deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku serta objek yang diamati.

Alasan penulis mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada di Desa Pembeliangan berdasarkan fakta-fakta yang nyata sesuai dengan permasalahan yang terdapat di desa tersebut, namun tidak membandingkan permasalahan yang ada dengan permasalahan lainnya. Sehingga permasalahan dengan mudah akan diperoleh melalui tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Fokus Penelitian

Berdasarkan teori dan konsep partisipasi masyarakat dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, meliputi :

a. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan jalan
b. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan puskesmas
c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan pasar

Sumber dan Jenis Data

sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Disini yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu *key informan* dan *informan*. Dalam hal ini *informan* adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode :

1. Teknik *purposive sampling*

   Metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa *informan* yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara (Arikunto, 2002). Dalam pemilihan *informan*, penulis menetapkan Sekretaris Desa yang menjadi *key informan* dan *informan* lainnya seperti Ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.
2. Teknik *Snowbal Sampling*

   Metode ini ialah teknik yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak para aparat untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti (bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar), bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono 2005:56). Dalam metode ini, penulis menjadikan masyarakat Desa Pembeliangan sebagai *informan.*

   Berdasarkan metode teknik sampling di atas, maka jumlah responden atau sampel penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari Sekretaris Desa, masing-masing Ketua RT (1, 2 dan 3), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat masing-masing sebanyak 3 orang per RT.

   Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

   1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.
   2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
      a. Dokumen-dokumen, yaitu laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.
      b. Buku-buku ilmiah, yaitu hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian, penulis menggunakan beberapa langkah, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari bahan literatur yang terkait dengan judul penelitian ini
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik, meliputi :
   a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
   b. *Informan* (Wawancara), yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa *informan* yang memiliki informasi yang terkait dengan penelitian.
   c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui arsip-arsip dan dokumen-dokumen terakit dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, berupa jenis data berbentuk tulisan yang sifatnya bukan angka, sumber B.Milles, Huberman dan Saldana (2014 : 31-32), yang mengatakan bahwa analisis data deskriptif kualitatif terdiri dari beberapa langkah-langkah dalam penelitian, yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condansation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sebuku terletak di bagian utara Kabupaten Nunukan. Kecamatan Sebuku pada tahun 2012 mengalami pemekaran wilayah dengan membagi wilayahnya menjadi Kecamatan Tulin Onsoi, luas kecamatan Sebuku mencapai 1.608,48 km2. Jumlah desa di Kecamatan Sebuku setelah pemekaran adalah 10 desa dengan total Penduduk 11.422 jiwa, dan memiliki pusat pemerintahan di Desa Pembeliangan. Keseluruhan desa di Kecamatan Sebuku terletak di kelurahan bukan pesisir yang terdiri dari desa/kelurahan di luar kawasan hutan 9 desa dan desa/kelurahan di luar kawasan hutan sebanyak satu desa. Kecamatan Sebuku dapat dicapai dari Kecamatan Nunukan melalui perjalanan sungai selama 2,5 jam. Kecamatan ini merupakan daerah transit bagi perjalanan darat selanjutnya menuju wilayah Lumbis dan Sembakung. Sumber penghasilan utama sebagian masyarakat Kecamatan Sebuku adalah dari Sektor Pertanian.

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Jalan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparat desa dan masyarakat menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai musrenbang dan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tersebut. Selain itu, musyawarah perencanaan pembangun jalan ini hanya dilakukan oleh aparat desa dan tidak melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan ketidakterbukaan aparat desa terhadap masyarakat. Pengambilan keputusan perencanaan pembangunan jalan hanya dilakukan oleh aparat desa. Setelah perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat barulah dilaksanakannya pembangunan jalan di desa Pembeliangan ini. Namun, masyarakat tetap membantu pembangunan dengan ikut serta bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak bahkan dana yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dipotong guna membantu kelancaran pembangunan dan perbaikan jalan. Sehingga dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan sangat kurang, namun partisipasi dalam hal membantu atau berpartisipasi dalam menyumbangkan materi atau dana dan berpartisipasi dalam menerima manfaat.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Puskesmas

Berdasarkan wawancara penulis dengan mantan kepala desa, dalam pembangunan puskesmas, sebelumnya tidak pernah dilakukan musrenbang bersama masyarakat, program ini awal mulanya merupakan ususlan dari anggota DPRD yang berasal dari Desa Pembeliangan dan disetujui oleh pemerintah kabupaten sehingga dibangunlah gedung puskesmas yang berada 5 km dari pusat pemerintahan Desa Pembeliangan. Sehingga penulis tidak melakukan wawancara kepada masyarakat lebih lanjut mengenai pembangunan puskesmas Desa Pembeliangan.

Dari serangkaian wawancara di atas, menunjukkan bahwa pada perencanaan pembangunan puskesmas Desa Pembeliangan, tidak adanya musrenbang sehingga puskesmas yang sudah dibangun oleh pemerintah menjadi tidak efisien dan belum ada tindakan lebih lanjut untuk mencari solusi terkait gedung puskesmas yang tidak terpakai. Maka penulis menyimpulkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan gedung puskesmas, namun berpartisipasi dalam penerimaan manfaat kurang lebih selama satu setengah tahun.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar

Berdasarkan wawancara dengan mantan Kepala Desa sebelumnya, pembangunan gedung pasar ini sejak berdiri tidak pernah terpakai sehingga tujuan pembangunannya juga tidak tercapai, baik dari segi manfaat maupun tujuannya sebagai pemecah sumbatan-sumbatan perekonomian.

Dari serangkaian wawancara peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembagunan gedung pasar.

Pembahasan

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Jalan

Melihat kondisi atau fakta yang ada khususnya masyarakat Pembeliangan dalam perencanaan jalan hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan aparat desa hanya mengundang sebagian masyarakat terkhususnya aparat desa. Padahal sebagian masyarakat ada yang memahami pentingnya musrenbang namun tidak diundang dan terlebih lagi masyarakat yang tidak mengetahui arti dan pentingnya musrenbang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat belum memahami benar arti dan pentingnya musrenbang. Hal ini dapat disebabkan karena faktor pendidikan dimana tingkat pendidikan masyarakat desa didominasi oleh masyarakat yang tidak tamat SD. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi pola fikir masyarakat sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya musrenbang dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sehingga ide dan gagasan masyarakat yang tidak diundang tidak tersalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti yaitu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan desa tidak mendapat undangan musrenbang, hanya pejabat desa saja, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan musrenbang tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya yaitu mengundang semua masyarakat. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Solekhan (2014:62) ada beberapa unsur yang harus ada untuk menjamin terlaksananya proses musrenbang secara pastisipatif. Unsur-unsur yang dimaksud Solekhan salah satunya ialah peserta musrenbang yang terdiri dari: (a) Spasial (ketua RW dan/atau Rt, kepala dusun; (b) Fungsional (tokoh agama, ketua adat, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, kelompok pemuda, komite sekolah); (c) Perempuan (Aisyah, Muslimah, Fatayat, Wanita Khatolik Indonesia, IWAPI dan lain-lain); dan (d) Kelompok-kelompok marginal (Pemulung, pengamen, ojek dan lain-lain).

Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan jalan, memang masyarakat tidak semua terlibat dalam partisipasi pembuatan keputusan namun berpartisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits), sehingga dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan dikatakan rendah dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa dalam hal ini mengundang masyarakat untuk hadir dalam perencanaan musrenbang. Selain itu pada tabel dapat ditarik kesimpulan, bahwa aparat telah mengadakan musrenbang namun hanya sebagian masyarakat yang diundang. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karena hanya sebagian yang

dapat memberikan pendapat dan idenya karena tidak semua lapisan masyarakat diundang.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Puskesmas

Sejak semula tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana dan tenaga, secara efektif, efisien, dan adil. Tanpa perencanan sebenarnya kegiatan pembangunan juga dapat dilaksanakan, tetepi besar kemungkinan tidak terlaksana secara efektif, efisien, dan adil sebagaimana diharapkan. Karena itulah perencanaan pembangunan ini masih tetap diperlukan sampai sekarang. Seperti yang dipaparkan oleh Bintoro Tjokroamidjojo dalam Sudriamunawar (2012:74) mengartikan perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Dari hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan puskesmas, aparat desa tidak melakukan musrenbang yang melibatkan masyarakat. Pembangunan puskesmas ini bukan merupakan program pemerintah desa melainkan pembangunan yang diajukan oleh individu anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang berasal dari Desa Pembeliangan. Dan ini tidak sesuai dengan mekanisme musrenbang yang tercantum dalam Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dimana untuk melakukan pembangunan perlu dilakukan musrenbang dengan beberapa tahapan-tahapan diantaranya perlu adanya pengelompokkan masalah, hasil penentuan peringkat masalah, usulan tindakan yang layak (peramalan) dan penentuan peringkat tindakan (rekomendasi). Masyarakat dikatakan berpartisipasi jika memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan dengan tahap awalnya melalui musrenbang. Dalam musrenbang sendiri masyarakat dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa ide maupun gagasan yang merupakan indikator partisipasi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan tingkat partisipasinya dalam perencanaan maupun pembangunan masyarakat Desa Pembeliangan dikategorikan rendah dimana pada tingkat ini dapat dikatakan partisipasi masyarakat difungsikan sebagai komunikasi satu arah yaitu pelaku selaku aparat desa hanya menyebarluaskan informasi mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan mereka sehingga tidak terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk bernegoisasi dan menyatakan pendapat.

Hal utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat karen tidak diselenggarakannya musrenbang. Berkaitan dengan pembangunan puskesmas yang dilakukan merupakan program pemerintah yang diajukan oleh perwakilan anggota DPR dimana merujuk kepada kebutuhan masyarakat sendiri. Namun pembangunan ini menjadi tidak efisien karena adanya pembangunan infrastruktur rumah sakit dimana puskesmas tidak difungsikan

lagi. Faktor penyebab ketidakefisienan pembangunan puskesmas juga disebabkan karena tidak adanya musrenbang yang didalamnya perlu aspirasi dan pertimbangan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan hingga pemanfaatannya, memang sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pelaku pembangunan namun dari segi kemanfaatannya, masyarakat hanya dapat berpatisipasi dalam kurun waktu yang singkat atau sebentar dan akhirnya gedung puskesmas yang telah dibangun tidak dimanfaatkan lagi karena adanya pembangunan rumah sakit yang baru. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa puskesmas yang telah dibangun tidak memberikan keefektifan dan keefisienan sesuai dengan tujuannya. Tentu saja hal ini merupakan dampak dari rendahnya partisipasi masyarakat dari awal perencanaan dan pembangunan sehingga tidak tergerak untuk menindaklanjuti kebermanfaatan gedung puskesmas yang tidak terpakai lagi. Sehingga dapat disimpulkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan puskesmas di Desa Pembeliangan.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pasar

Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam poroses penyusunan rencana tersebut. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Dari hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan pasar Desa Pembeliangan, pembangunan pasar merupakan salah satu program dari PNPM dimana tujuannya sangat baik yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Namun, pembangunan pasar ini mejadi tidak tepat sasaran, dimana lokasi pembangunan pasar berdekatan dengan fasilitas penginapan milik desa. Hal ini terjadi karena memang tidak diselenggarakannya musrembang yang seharusnya membahas lokasi, kefektifan dan keefesienan pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Hal ini juga lah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Di samping itu, tanpa aspirasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Bahkan tidak jarang pula terjadi masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Sepertinya hal nya dalam pembangunan pasar di Desa Pembeliangan. Pasar yang sudah dibangun yang sudah berdiri tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan dan fungsi pembangunannya. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikatakan Ginandjar Kartasasmita (1996:92) bahwa pembangunan prasarana satu diantara upaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan, dalam menerima manfaat

serta dalam evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pasar di Desa Pembeliangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pembeliangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dikatakan sangat rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya :

1. Mekanisme perencanaan pembangunan yang kurang tepat, dimana pemerintah desa tidak melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam musrenbang seperti pengelompokkan masalah, hasil penentuan peringkat masalah, usulan tindakan yang layak (peramalan) dan penentuan peringkat tindakan (rekomendasi) yang melibatkan masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dilakukan oleh aparat desa terkhusus dalam perencanaan pembangunan jalan, sedangkan pembangunan gedung puskesmas dan pasar tidak dilakukan musrenbang bersama masyarakat sehingga fasilitas yang sudah dibangun tidak terpakai dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini berati pendekatan yang dilakukan pemerintah desa merupakan pembangunan yang berasal dari atas ke bawah, mulai dari proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses-proses pengontrolan diformat dari atas ke bawah.
3. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat Pembeliangan tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan masih kurang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk di Desa Pembeliangan memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, yakni mayoritas lulusan SD dengan presentase 26,17%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti sebutkan di atas, maka berikut ini saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Perlu adanya pembenahan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat yakni sesuai dengan tata aturan dan melibatkan pelaku musrenbang tersebut diantaranya: perwakilan komponen masyarakat, individu atau kelompok (spasial, fungsional, perempuan, marginal) yang berada di desa/kelurahan, serta melakukan sosialisasi pentingnya partisipasi dalam pembangunan.
2. Sebaiknya pemerintah desa membuka komunikasi dengan masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang ada di Desa

Pembeliangan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipasi*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri

_____. 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif.

_____. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

_____.2008. *Intervensi Komunitas (Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat).* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

_____.2013. *Intervensi dan Pengembangan Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat).* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Adisasmita, Raharjo.2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

_____.2016. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: ALFABETA

_____.2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori dan Implementasinya di Era Reformasi*. Bandung: ALFABETA

_____.2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*: *Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi.* Bandung: ALFABETA

Anggara, Sahya dan Sumantri. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek.* Bandung: CV. Pustaka Setio

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Uang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo

Bhattacharyya, J. 1972. *Administrative Organitation*. Brusel : HAS

Conyers, Diana.1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press

Chilcote, Ronald. 2003. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada

Handayaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Cv Haji Masagung.